

Memberantas Terorisme, Muhammadiyah dan Polri Akan Lakukan Kajian Hukum

Senin, 11-04-2016

Jakarta -- Muhammadiyah akan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan kajian-kajian hukum, terkhusus kaitannya dalam pemberantasan terorisme. Ini menyusul adanya kasus Siyono, warga Klaten, terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88 hingga dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan tak bernyawa.

"Ini sekaligus bagi Muhammadiyah untuk memberikan pandangan yang secara luas," ujar Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Suyatno saat memberikan pengantarnya dalam Pengajian Bulanan Muhammadiyah, di Jakarta, Jumat (8/4). Pandangan itu, menurut Suyatno, yakni mengenai sikap Muhammadiyah menanggapi terorisme.

Muhammadiyah, Suyatno menuturkan, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar bersatu memberantas terorisme. Sebab, kata dia, tak lain, terorisme adalah kejahatan yang dapat menghancurkan peradaban manusia.

Karena itu, Muhammadiyah, mendapat gugatan yang luar biasa dari pihak lain setelah mengawal kasus Siyono dengan melakukan otopsi oleh tim forensik pada mayatnya di Klaten. "Muhammadiyah di satu sisi menjalankan amar maruf nahi mungkar, di sisi lain mendapat kecaman," ucap rektor Universitas Prof. DR. Hamka ini.

Namun, Suyatno memberitahukan, melalui rapat pleno PP Muhammadiyah, pengawalan kasus Siyono yang dilakukan Muhammadiyah adalah di jalan yang benar. "Walaupun tantangannya sangat kuat," terang dia. Pengawalan kasus Siyono ini, kata dia, yaitu untuk mencari keadilan dan kebenaran yang ada.

Ihwal ini, sambung dia, Muhammadiyah akhirnya menyampaikan apa saja yang telah dilakukannya kepada Kapolri. Tak hanya itu, kata Suyatno, Muhammadiyah pun punya kepentingan mendorong warga Muhammadiyah tidak terprovokasi.

"Bahwa kita satu jalan memberantas terorisme," kata Suyatno menyimpulkan se usai pertemuan Muhammadiyah dengan Kapolri. (Ridho) (dzar)

(Reporter: Ilma Aghniatunnisa)